PERSEPSI NOTARIS TERHADAP PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PER-HARI DI KOTA BENGKULU
WENY ARIMBI C, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

PERSEPSI NOTARIS TERHADAP PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PER-HARI DI KOTA BENGKULU

Oleh :

Weny Arimbi Cristiani[1], Harry Purwanto[2]

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisa dan menyimpulkan fakta di lapangan mengenai persepsi notaris di kota Bengkulu, terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per-Hari, serta upaya Dewan Kehormatan Daerah Kota Bengkulu dalam pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer atau data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, dengan cara mewawancarai responden dan narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan penyajian data secara dekriptif.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat persepsi yang berbeda terhadap adanya peraturan tersebut. Tidak semua notaris di kota Bengkulu setuju dan menjalankan peraturan tersebut. Pada dasarnya tujuan diberlakukannya peraturan tersebut adalah agar Notaris menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya. Untuk itu Dewan Kehormatan Daerah Kota Bengkulu melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaksanaan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per-Hari.

Kata Kunci : Persepsi, Notaris, Peraturan, DKP, Bengkulu

[1] Jalan Kampar 3 No 3, Provinsi Bengkulu, arimbiwenny@gmail.com
[2] Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PERSEPSI NOTARIS TERHADAP PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG BATAS KEWAJARAN JUMLAH PEMBUATAN AKTA PER-HARI DI KOTA BENGKULU
WENY ARIMBI C, Dr. Harry Purwanto, S.H., M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

NOTARY PERCEPTION TOWARDS REGULATION OF THE CENTRAL BOARD OF HONORARY OF THE INDONESIAN NOTARIES ASSOCIATION NO. 1 OF 2017 ABOUT THE FAIR LIMITS OF PER-DAY AMOUNT OF CERTIFICATE ISSUING IN BENGKULU

By :
Weny Arimbi Cristiani[3], Harry Purwanto[4]

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain, analyze and conclude facts in the field about notary perception in Bengkulu, to the Regulation of the Central Board of Trustees of the Indonesian Notaries Association No. 1 of 2017 on the Fairness Limit Number of Permanent Deeds, and the efforts of Bengkulu's Regional Honorary Council in the supervision and implementation of the regulation.

This research apply an empirical law research method that conducted by examining the primary data or data that obtained directly from the society. The data used were primary and secondary. Primary data were obtained by using data collection tools in the form of interview guidelines that used to interview the relevant respondents and resource persons. All the data collected were analyzed qualitatively and presented descriptively.

Based on the results of this research, there are different perceptions of the existence of these regulations. Not all notaries in the Bengkulu agree and implement the regulation. Basically, the purpose of the enforcement of the regulation is that so the Notary performs the duties and positions in accordance with the laws and the code of conduct. For that Bengkulu's Regional Honorary Council do the prevention and action toward the implementation of the Regulation of the Central Board of Honorary of the Indonesian Notaries Association No. 1 of 2017 about the Fairness Limit of Per-Day Amount of Certificate Issuing in Bengkulu.

Keywords: Perception, Notary, Regulation, Central Board of Honorary, Bengkulu

[3] Jalan Kampar 3 No 3, Provinsi Bengkulu, arimbiwenny@gmail.com
[4] Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada